



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2015**



Jalan Surapati Nomor 1 Telp. (0365)41210

Negara – Bali

2014

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu.....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	6
2.3. Permasalahan / hambatan.....	8
2.4. Pemecahan Masalah.....	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	10
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	10
3.2. Program dan Kegiatan	11
BAB IV. PENUTUP	12

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 50 Tahun 2007, diamanatkan bahwa Pimpinan SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pegangan bagi setiap SKPD dalam mengelola keuangan guna melaksanakan program dan /kegiatan selama satu tahun Anggaran.

Dengan tersusunnya Renja (Rencana Kerja) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi, menganalisis kinerja, mengetahui permasalahan dan pemecahan masalah yang ada serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaannya . Mudah-mudahan Rencana kerja (Renja) ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana.

Negara, 5 Maret 2014

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Jembrana



I KOMANG SUPARTA,S.SOS

Penata Tk. I

NIP. 19660325 198703 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Proses Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian dilaksanakan forum SKPD oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotismo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana
 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
 9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 tahun 2011 tentang rincian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi , Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana. Sebagai satu dokumen perencanaan Renja SKPD akan digunakan sebagai acuan /dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2015 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana tahun 2015 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, yang dalam hal ini tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana tahun 2015

2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tahun 2015 untuk diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Jembrana.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan Kantor dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, Dasar hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tahun 2015.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh SKPD serta Pemecahan Masalah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini menguraikan tentang Tujuan , Sasaran dan Rencana Program Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2015.

BAB IV. P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja disini maksudnya adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Perijinan tahun 2013 telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 10 kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
 - c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan alat tulis kantor.
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - j. ISO 9001-2008
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional
 - b. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Pelayanan Umum

- a. Peningkatan Pelayanan Perijinan
- b. Peningkatan Penertiban Reklame
- c. Peningkatan Pendataan perijinan
- d. Peningkatan Verifikasi Perijinan

A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan (Rp.)	%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . Kegiatan :				
1	Penyediaan Jasa surat menyurat.	2.420.000	98.27	2.330.000	96.28
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas / operasional	3.600.000	100	926.500	80.57
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.300.000	90.00	15.900.000	86.89
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.751.130	99.07	14.364.750	97,38
5	Penyediaan alat tulis kantor	42.494.070	100	42.871.500	99,82
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.150.000	100	2.793.000	88.67
7	Penyediaan makanan dan minuman	8.725.000	100	8.710.000	99,83
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	19.085.900	57,35	18.919.900	99,13
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	350.600.000	100	350.110.000	99,86
10	ISO 0001-2008	15.000.000	0	0	0

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan (Rp.)	%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.000.000	100	60.000.000	100
1.	Penyediaan jasa sewa kendaraan dinas	48.439.200	98,29	45.137.933	93,18
2.	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas.				
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	20.750.000	99	18.360.000	88,48
1.	Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu.				
IV	Program peningkatan Pelayanan Umum.	128.332.500	86,77	117.974.970	91,93
1.	Peningkatan pelayanan perijinan	15.264.500	89,00	11.403.050	74,70
2.	Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Reklame	3.684.800	85,00	3.458.200	93,85
3.	Peningkatan Pendataan Perijinan	22.895.000	87,00	22.360.000	97,66
4.	Peningkatan verifikasi / Klarifikasi Perijinan				
	JUMLAH	787.965.600	86,62	740.701.803-	94,00

2.2 Analisis Kinerja

a. Meningkatnya pelayanan perijinan.

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah permohonan/ pencari ijin. Sedangkan hasil (outcome) adalah ijin yang telah diterbitkan. Dalam kegiatan pelayanan perijinan tahun 2013 disediakan anggaran dana

sejumlah Rp. 128.332.500,- Dari anggaran ini telah realisasi sebesar Rp. 117.974.970,- atau 91,93 %.

Jumlah permohonan ijin yang masuk tahun 2013 adalah 11.471 buah , dan jumlah permohonan ijin tahun 2012 yang terbit tahun 2013 sebanyak 167 buah, dan permohonan tahun 2013 yang terbit tahun 2013 sebanyak 11.141 buah total ijin yang terbit tahun 2013 sebanyak 11.308 buah.

Kendala yang di hadapi di antaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus ijin, terlambatnya proses terbitnya ijin-ijin, karena pemohon ijin kurang melengkapi persyaratan perijinan yang telah ditentukan, dan setelah cek lapangan pemohon lambat membayar retribusi.

b. Meningkatnya Penertiban Reklame

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah Jumlah penertiban reklame. Capaian Kinerja dari Indikator penertiban dimana hasil (outcome) yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya jumlah reklame yang sesuai aturan dengan indikator kinerja (output) jumlah terlaksananya penertiban reklame. Dari Kegiatan ini disediakan anggaran dana Rp. 15.264.500,- , dan sudah realisasi sebesar Rp. 11.403.050,- atau 74.70 % .

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah masih rendahnya kesadaran pemasang reklame dalam menata, estetika, etika dan pemanfaatan ruang.

c. Meningkatnya pendataan perijinan

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah jumlah pendataan/monitoring perijinan. Capaian kinerja dari indicator pendataan/monitoring perijinan, dimana hasil (Out come) adalah Perijinan baik yang masih berlaku maupun yang habis masa berlakunya. Kegiatan Pendataan Perijinan disediakan anggaran dana sejumlah Rp. 3.684.800,-, dan anggaran ini sudah realisasi sebesar Rp.3.458.200,- atau 93,85 % .

d. Peningkatan Verifikasi dan Klarifikasi perijinan.

Indikator Kinerja Utama pencapaian sasaran ini adalah jumlah permohonan ijin yang diverifikasi.

Capaian kinerja dari indikator Verifikasi perijinan dimana hasil (Out come) jumlah permohonan ijin yang sesuai dengan aturan. Dari kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 22.895.000,- dan anggaran ini sudah realisasi sebesar Rp. 22.360.000,- atau 97,66 % Jumlah permohonan ijin yang masuk dan diverifikasi tahun 2013 adalah sebanyak 11.471 buah

2.3 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

1. Pada pelayanan perijinan :
 - a. Terlambatnya penyampaian kajian hasil cek lapangan dari instansi terkait ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
 - b. Terbatasnya anggaran dana untuk mendukung kegiatan operasional perijinan
 - c. SDM yang ada pada pelayanan perijinan belum memadai.
 - d. Terhambatnya proses penerbitan ijin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan ijin atau belum membayar retribusi.
2. Pada kegiatan penertiban dan pengawasan reklame :
 - a. Masih rendahnya kesadaran pemasang reklame dalam menata, estetika, etika dan pemanfaatan ruang.
 - b. Pemasang reklame kadang-kadang tidak ada pemberitahuan dan tidak mencantumkan nomor HP sehingga sulit menghubungi.
3. Pada kegiatan pendataan perijinan :
 - a. SDM yang ada belum memadai.
 - b. Sarana untuk mendukung kegiatan operasional belum memadai.

2.4 Pemecahan Masalah

1. Menyurati instansi yang terkait agar segera mengirim kajian ke Kantor pelayanan Perijinan Terpadu.
2. Memberi informasi kepada masyarakat / para pengusaha tentang prosedur dan persyaratan permohonan perijinan.

3. Menyarankan kepada pemasang reklame agar memenuhi kriteria atau aturan yang telah ditentukan dan mencantumkan Nomor HP agar mudah menghubungi.
4. Mengusulkan ke Bagian Kepegawaian agar dibantu tambahan pegawai .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDTahun 2015

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Meneg. PAN menyatakan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (Meneg PAN.2008.20). Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan yang akan dicapai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam tahun 2015 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan umum / perijinan .

Setelah ditetapkan tujuan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selanjutnya ditentukan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN.2008:21-22). Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulan, paling lama satu tahun.

Adapun sasaran rencana kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana tahun 2015 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, benar dan transparan.
2. Meningkatnya permohonan / pencari ijin
3. Meningkatnya jumlah ijin yang terbit

3.2. PROGRAM DAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah sebagai berikut ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. Penyediaan makan dan minum
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- j. I S O 9000-2008

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan rutin// berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Peningkatan Pelayanan Umum :

- a. Peningkatan Pelayanan Perijinan
- b. Peningkatan Penertiban Reklame
- c. Peningkatan Pendataan Perijinan
- d. Peningkatan Verifikasi Perijinan

B A B I V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan intisari dari program dan kegiatan prioritas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2015 . Rencana kerja ini ini selanjutnya akan dipakai acuan dalam menyusun pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan program/kegiatan selama Tahun 2015 dan juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai Tahun 2015.

Negara, 5 Maret 2014

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Jembrana



I KOMANG SUPARTA, S.Sos.

NIP. 19660325 198703 1 007

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	1	20	23	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran	KPPT	92%	229.409.950	APBD		92%	262.758.000
1	20	1	20	23	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan m,eterai, prangko	KPPT	600 bh	2.420.000	APBD		600 bh	2.541.000
1	20	1	20	23	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah alat-alat dan bahan pembersih kantor	KPPT	5 jenis	2.670.000	APBD		5 jenis	2.803.500
1	20	1	20	23	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	KPPT	4 jenis	14.800.000	APBD		4 jenis	16.280.000
1	20	1	20	23	01	10	Penyediaan ATK	Jumlah alat-alat tulis kantor	KPPT	92%	38.079.000	APBD		93%	40.500.000

1	20	1	20	12	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan	KPPT	5 jenis	13.609.800	APBD		5 jenis	16.000.000
1	20	1	20	23	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	KPPT	4 jenis	33.000.000	APBD		5 jenis	36.300.000
1	20	1	20	23	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makan/Minum Tamu	KPPT	12 bln	8.741.000	APBD		12 bln	9.178.000
1	20	1	20	23	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	KPPT	92%	48.750.000	APBD		93%	51.187.500
1	20	1	20	23	01	22	ISO 9001 - 2008	Jumlah Pemeliharaan sertifikasi ISO	KPPT	1 paket	15.000.000	APBD		1 paket	15.750.000
									KPPT						
1	20	1	20	23	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	KPPT	88%	60.976.000	APBD		88%	66.000.000
1	20	1	20	23	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	KPP	3 unit	60.976.000	APBD		4 unit	64.024.000

1	20	1	20	23	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Disiplin Aparatur	KPPT	88 %	22.750.000	APBD		88 %	25.025.000
1	20	1	20	23	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	KPPT	70 stel	22.750.000	APBD		70 stel	25.025.000
1	20	1	20	23	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Laporan Capaian Kinerja	KPPT	90 %	13.463.500	APBD		90 %	14.136.000
1	20	1	20	23	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	KPPT	6 jenis	13.463.500	APBD		6 jenis	14.136.000
1	20	1	20	23	29		Program Peningkatan Pelayanan Umum	Prosentase pelayanan perijinan yang tepat, cepat, benar dan transparan	KPPT	85 %	158.706.300	APBD		86%	167.641.000
1	20	1	20	23	29	01	Peningkatan Pelayanan perijinan	Jumlah pengecekan ijin di lapangan	KPPT	155 kali	115.149.000	APBD		155 kali	120.906.000
1	20	1	20	23	29	02	Peningkatan Penertiban Reklame	Jumlah Cek Reklame di	KPPT	98 Kali	17.517.300	APBD		98 Kali	18.393.000

								Lapangan								
1	20	1	20	23	29	03	Peningkatan Pendataan Perijinan	Jumlah Pendataan Ijin	KPPT	24 Kali	3.680.000	APBD		24 Kali	3.684.000	
1	20	1	20	23	29	04	Peningkatan Verifikasi Perijinan	Jumlah Ijin yang di Verifikasi	KPPT	9040 bh	22.360.000	APBD		9040 bh	24.478.000	
							JUMLAH				432.965.600				445.366.000	

LAMPIRAN I
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN								
	URUSAN WAJIB								
01	20 01 20 12	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU							
1	20 1 20 23 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KPPT	92%	217.165.200,00		92%	230.908.977,00	
1	20 1 20 23 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KPPT	559 bh	2.420.000,00		559 bh	2.662.000,00	
1	20 1 20 23 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KPPT	12 kali	45.000.000,00		12 kali	49.500.000,00	
1	20 1 20 23 1 8	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	KPPT	4 jenis	2.121.000,00		4 jenis	2.343.000,00	
1	20 1 20 23 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	KPPT	4 jenis	17.000.000,00		4 jenis	17.930.000,00	
1	20 1 20 23 01 10	Penyediaan ATK	KPPT	1 paket	39.394.400,00		1 paket	41.798.977,00	
1	20 1 20 23 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KPPT	4 jenis	9.943.800,00		4 Jenis	11.000.000,00	
1	20 1 20 23 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPT	6 jenis	25.500.000,00		8 jenis	25.000.000,00	
1	20 1 20 23 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	KPPT	12 kali	12.076.000,00		12 kali	12.150.000,00	
1	20 1 20 23 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	KPPT	1 tahun	48.710.000,00		1 tahun	53.525.000,00	
1	20 1 20 23 01 22	ISO 9001 - 2008	KPPT	1 paket	15.000.000,00		1 paket	15.000.000,00	
1	20 1 20 23 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	KPPT	89%	53.462.500,00		89%	54.475.000,00	
1	20 1 20 12 02 24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	KPPT	3 unit	53.462.500,00		3 unit	54.475.000,00	
1	20 1 20 23 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	KPPT	89%	22.750.000,00		89%	27.500.000,00	

1	20	1	20	23	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah ketersediaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	KPPT	70 stel	22.750.000,00	70 stel	27.500.000,00	
1	20	1	20	23	06		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan	KPPT	90%	12.595.400,00	90%	13.709.000,00	
1	20	1	20	23	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah ketersediaan Laporan capaian kinerja kinerja	KPPT	6 jenis	12.595.400,00	6 jenis	13.709.000,00	
1	20	1	20	23	29		Program Peningkatan Pelayanan Umum	Prosentase Layanan Perijinan yang Tepat, Benar, Cepat dan Transparan	KPPT	87%	326.992.500,00	88%	335.141.000,00	
1	20	1	20	23	29	01	Peningkatan Pelayanan Perijinan	Jumlah pengecekan ijin di lapangan	KPPT	150 kali	263.000.000,00	150 kali	265.500.000,00	
1	20	1	20	23	29	02	Peningkatan Penertiban Reklame	Jumlah pelaksanaan penertiban reklame		94 kali	30.307.500,00	94 kali	34.441.000,00	
1	20	1	20	23	29	03	Peningkatan Pendataan Perijinan	Jumlah monitoring perijinan yang masih berlaku dan yang habis masa berlakunya		24 kali	4.825.000,00	24 kali	5.000.000,00	
1	20	1	20	23	29	04	Peningkatan Verifikasi Perijinan	Jumlah Ijin yang di Verifikasi	KPPT	9.030 bh	28.860.000,00	9.030 bh	30.200.000,00	
							JUMLAH				632.965.600,00		661.733.977,00	

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Jembrana



I KOMANG SUPARTA, S.Sos
NIP. 19660325 198703 1 007

